

Dinamika Relasi Suami Istri dalam Kesetaraan Gender pada Masyarakat Budaya Patriarki di Kepulauan Mandangin Kabupaten Sampang

Rina Nur Azizah ^{1*}, Indra Devian Lumban Gaol ², Mashur Hasan Bisri ³

¹ Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Madura

^{2,3} Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

*Corresponding author: rina_nurazizah@unira.ac.id

ARTICLE INFO

Submitted:

March 3, 2026

Review:

March 31, 2026

Accepted:

April 21, 2026

Available online:

April 30, 2026

Article Citation (APA):

Azizah, R., Gaol, I., & Bisri, M. (2026). Dinamika Relasi Suami Istri Dalam Kesetaraan Gender Pada Masyarakat Budaya Patriarki Di Kepulauan Mandangin Kabupaten Sampang. *Jurnal Publisitas*, 12(2), 191-200. <https://doi.org/10.37858/publisitas.v12i2.691>

DOI: <https://doi.org/10.37858/publisitas.v12i2.691>

ABSTRAK

Gender dipahami sebagai sebuah kerangka analitis yang membedakan peran laki-laki dan perempuan. Struktur patriarki secara historis telah mengukuhkan ketimpangan gender dengan menempatkan laki-laki sebagai pemegang kendali atas perempuan. Tujuan penelitian ini dilakukan bertitik tolak dari fenomena ketimpangan gender di Kepulauan Mandangin, di mana perempuan sering kali dipandang sebagai second class. Metode yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Observasi dilakukan di Kepulauan Mandangin dan wawancara dilakukan dengan pejabat pemerintah desa, tokoh masyarakat dan masyarakat Kepulauan Mandangin. Teknik analisis data yang digunakan adalah mengolah dan mempersiapkan data untuk di analisis, membaca keseluruhan data, memulai coding semua data. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa struktur sosial di Kepulauan Mandangin, Kabupaten Sampang masih didominasi oleh sistem nilai patriarki yang membatasi ruang gerak Perempuan. Budaya lokal mengonstruksi peran laki-laki sebagai pemegang otoritas tunggal, yang secara tidak langsung menciptakan ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi dan pendidikan bagi kaum perempuan. Perempuan yang dianggap sebagai Second class, hal ini mendorong perempuan untuk terlibat aktif dalam kegiatan produktif, seperti pengolahan hasil laut. Selain itu program PEKA (Perempuan Kepala Keluarga) dalam konteks masyarakat di Kepulauan Mandangin, menjadi titik balik krusial merupakan pengaruh yang sangat kuat terhadap budaya patriarki yang selama ini berakar kuat. Saran dan rekomendasi dari penelitian ini adalah pemerintah perlu memperluas jangkauan program PEKA sebagai model pemberdayaan berbasis komunitas yang terintegrasi dengan kebijakan daerah (Perda) mengenai perlindungan perempuan. Pemerintah perlu melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat (Kepala Desa/Lurah) dalam dialog mengenai kesetaraan gender.

Kata Kunci: *Second Class*, PEKA, Patriarki, Kesetaraan Gender

ABSTRACT

Gender is understood as an analytical framework that differentiates the roles of men and women. Patriarchal structures have historically reinforced gender inequality by placing men in control over women. The purpose of this study is based on the phenomenon of gender inequality in the Mandangin Islands, where women are often viewed as second-class. The method used in this study is a qualitative descriptive method. Observations were conducted in the Mandangin Islands and interviews were conducted with village government officials, community leaders, and the Mandangin Islands community. Data analysis techniques used were processing and preparing data for analysis, reading all data, starting with coding all data. From the results of the study, it can be concluded that the social structure in the Mandangin Islands, Sampang Regency, is still dominated by a patriarchal value system that limits women's space for movement. Local culture constructs the role of men as the sole authority holders, which indirectly creates unequal access to economic resources and education for women. Women are considered second-class, this encourages women to be actively involved in productive activities, such as processing seafood. Furthermore, the PEKA (Female Heads of Households) program, in the context of the Mandangin Islands

community, has become a crucial turning point, exerting a powerful influence on the deeply rooted patriarchal culture. The research suggests that the government should expand the reach of the PEKA program as a community-based empowerment model integrated with regional policies (Perda) on women's protection. The government should involve religious and community leaders (village heads/heads) in dialogues on gender equality.

Keywords: *Second Class, PEKA, Patriarchy*

PENDAHULUAN

Seksualitas sebagai cabang ilmu sosial masih tergolong baru di Indonesia maupun di Barat, urgensinya tetap signifikan di tengah isu-isu krusial seperti kemiskinan dan krisis ekonomi (Suryono, 2021). Seksualitas bukan sekadar fenomena biologis, melainkan sebuah konstruksi sosial yang mencerminkan struktur kekuasaan, nilai agama, dan kebijakan negara (Bennett & Davies, 2023). Fenomena ini berfungsi sebagai barometer sosial; di mana dalam situasi krisis, perilaku seksual sering kali muncul sebagai simbol ekspresi yang berkaitan erat dengan dinamika kekuasaan dalam Masyarakat (Pratama & Wahyudi, 2022).

Seksualitas senantiasa dipengaruhi oleh dinamika sistem kekeluargaan, transformasi ekonomi-sosial, serta pergerakan politik dan resistansi masyarakat. Merujuk pada pemikiran Michel Foucault, seksualitas merupakan instrumen sentral dalam mekanisme kekuasaan. Dalam praktiknya, kekuasaan berperan dalam memproduksi pengetahuan, menetapkan standar moralitas (baik-buruk), serta mendisiplinkan perilaku individu. Akibatnya, subjektivitas seksual seseorang bukan sekadar dorongan alami, melainkan hasil bentukan dan regulasi dari rezim kekuasaan yang ada.

Isu mengenai kesetaraan gender tetap menjadi topik utama di tingkat internasional yang mencakup dimensi sosial, politik, ekonomi, dan budaya (Rabina Yunus, 2022). Pada konteks nasional, Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat terhadap keseimbangan peran antara pria dan wanita demi kemajuan pembangunan. Namun, implementasi kebijakan tersebut di level akar rumput masih terhambat oleh nilai-nilai kultural dan struktur sosial tradisional yang sulit diubah.

Studi gender di lingkungan akademisi Indonesia menyoroti sulitnya perempuan mencapai posisi yang seimbang dengan laki-laki (Nurdin, 2024). Kendala utamanya terletak pada ekspektasi budaya yang mengharuskan perempuan tetap memegang kendali penuh atas urusan domestik meskipun mereka telah terjun ke sektor publik.

Gender dipahami sebagai sebuah kerangka analitis yang membedakan peran laki-laki dan perempuan berdasarkan perspektif sosiokultural, bukan sekadar atribut biologis. Sebagai bentuk konstruksi sosial, gender menepis anggapan bahwa perbedaan fisik atau fungsi reproduksi dapat dijadikan dasar diskriminasi. Meskipun masyarakat sering melekatkan sifat maskulin seperti kekuatan dan rasionalitas kepada laki-laki, sifat-sifat tersebut sebenarnya bersifat cair dan dapat dipertukarkan. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bagi perempuan untuk memiliki karakter yang kuat dan rasional, sebagaimana laki-laki dapat memiliki sisi lembut atau keibuan (Yuni Sulistyowati, 2020).

Isu keadilan gender telah menjadi wacana global yang mendunia, termasuk di Indonesia. Jejak perjuangan ini dapat ditarik kembali ke masa R.A. Kartini, yang mempelopori emansipasi agar perempuan mendapatkan hak pendidikan yang setara dengan laki-laki. Meski demikian, perjuangan tersebut masih menghadapi tantangan besar hingga saat ini. Mengutip (Zuhri & Amalia, 2022), diskriminasi gender tetap langgeng akibat stigma masyarakat yang memandang

perempuan sebagai pihak yang lemah secara fisik dan posisi sosial dibandingkan laki-laki. Pandangan seperti ini, yang diperparah oleh kuatnya budaya patriarki, sering kali berujung pada tindakan eksploitasi dan penindasan terhadap kaum Perempuan (Rahayu, 2021).

Struktur patriarki secara historis telah mengukuhkan ketimpangan gender dengan menempatkan laki-laki sebagai pemegang kendali atas perempuan. Hal ini terlihat jelas dalam manajemen ekonomi keluarga, di mana suami bertindak sebagai pencari nafkah tunggal, sedangkan istri bertugas mengelola pengeluaran internal rumah tangga. Konstruksi sosial ini memosisikan perempuan sebagai elemen sentral dalam ruang privat (domestik) dan memberikan akses eksklusif bagi laki-laki untuk berkiprah di ruang terbuka (publik) (Ramadhani & Fitriani, 2023).

Pembangunan yang inklusif hanya dapat terwujud jika hambatan gender disingkirkan. Oleh karena itu, diperlukan reposisi hubungan dalam rumah tangga agar suami dan istri dapat saling mendukung, sehingga perempuan memiliki ruang gerak yang sama luasnya untuk berkontribusi di ranah publik maupun domestik. Pencapaian kesetaraan gender yang substansial sangat bergantung pada terciptanya pola relasi yang sehat dan setara antara suami dan istri sebagai mitra sejajar. Relasi suami istri yang berlandaskan prinsip keadilan menjadi fondasi krusial dalam mengikis praktik diskriminatif terhadap perempuan. Dengan memperbaiki dinamika hubungan di tingkat keluarga, partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan dapat dioptimalkan demi mewujudkan tatanan sosial yang lebih setara (Kodir, 2019).

Kepulauan Mandangin, Madura, yang secara administratif terbagi menjadi tiga dusun, masih terdapat stigma sosial yang menempatkan perempuan sebagai *Second class*. Konstruksi sosial di masyarakat setempat cenderung membatasi kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki, sehingga peran perempuan sering kali terpinggirkan. Budaya patriarki yang mengakar kuat di Kepulauan Mandangin, telah menempatkan perempuan dalam posisi subordinat yang membatasi ruang gerak mereka baik di ranah domestik maupun publik (Prasetyo, 2018). Di wilayah yang terdiri dari tiga dusun ini, konstruksi sosial masyarakat cenderung memandang perempuan dimana akses terhadap hak-hak dasar dan pengambilan keputusan sering kali didominasi oleh laki-laki (Sulaiman, 2023). Dominasi laki-laki ini tidak hanya menciptakan ketimpangan relasi kuasa (Hidayati & Rahmawati, 2023), tetapi juga menghambat partisipasi perempuan dalam pembangunan desa. Untuk memutus rantai diskriminasi tersebut, diperlukan reorganisasi struktural dalam keluarga dan masyarakat guna menciptakan relasi yang lebih setara, sehingga perempuan tidak lagi dipandang sebelah mata dalam pemenuhan hak-haknya sebagai warga negara (Sulaiman, 2023).

Sinergi dalam hubungan suami istri memegang peranan krusial sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi di berbagai level, mulai dari ranah domestik hingga skala nasional. Ketika perempuan mendapatkan hak yang setara dalam aspek edukasi, karir, serta kendali atas aset finansial, kapasitas mereka untuk menyumbang pada kemajuan pembangunan akan meningkat secara eksponensial. Salah satu pilar utama dalam akselerasi ekonomi ini adalah optimalisasi potensi finansial perempuan. Khusus di wilayah pesisir, seperti di Kepulauan Mandangin, penguatan kemandirian perempuan melalui akses terhadap lembaga keuangan makro menjadi strategi vital (Azizah, 2024). Inisiatif ini dirancang untuk mendobrak hambatan ekonomi yang selama ini membatasi ruang gerak masyarakat setempat.

Secara mendasar, keberhasilan kesetaraan gender dapat diukur dari sejauh mana perempuan memiliki otoritas di sektor ekonomi. Dalam implementasinya, proses transformasi

ini memerlukan intervensi dan dukungan kuat dari pemerintah selaku pemangku kebijakan (stakeholder) utama guna menciptakan ekosistem yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat (Azizah et al., 2024). Kemandirian ekonomi sebuah bangsa tidak lepas dari dinamika hubungan di dalam keluarga yang saling mendukung. Ketika perempuan diberikan hak yang sejajar dalam menempuh pendidikan dan berkariyer, potensi ekonomi yang mereka miliki dapat teroptimalisasi. Hal ini membuktikan bahwa kesetaraan gender dalam relasi suami istri menjadi langkah krusial bagi kesejahteraan finansial di semua level.

Berdasarkan temuan di lapangan bahwa meskipun struktur budaya patriarki di Kepulauan Mandangin masih menempatkan perempuan dalam posisi subordinat (*second class*), terdapat dinamika menarik dalam sektor penguatan ekonomi. Secara empiris di Kepulauan Mandangin menunjukkan perempuan yang awalnya berada di posisi *second class* secara bertahap naik menjadi pengambil keputusan ekonomi (*breadwinner*). Hal ini membuktikan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah pintu masuk paling efektif untuk mereduksi dampak negatif patriarki tanpa harus berkonfrontasi langsung dengan budaya lokal. Budaya tersebut tidak sepenuhnya memadamkan potensi perempuan, sebaliknya ketika diberikan kesempatan dan akses, perempuan pesisir terbukti mampu menjadi pilar penyangga finansial keluarga yang tangguh (Sukarman Kamuli & Hatu, 2017).

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana relasi suami istri dalam kesetaraan gender di Kepulauan Mandangin, di mana perempuan sering kali dipandang sebagai *second class*. Struktur sosial yang patriarkis ini menjadi penghalang bagi keterlibatan perempuan dalam Kesejahteraan Perekonomian. Sebagai solusi strategis, penelitian ini menawarkan penguatan relasi antara suami dan istri yang berlandaskan prinsip kesetaraan. Penataan ulang peran di tingkat keluarga diyakini sebagai pilar penyangga yang efektif untuk mengoptimalkan kontribusi ekonomi perempuan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi di Kepulauan Mandangin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian Kualitatif berkenaan dengan data yang bukan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif (Creswell, 2020). Metode penelitian Kualitatif menggunakan interview secara mendalam dan observasi berperan serta dalam mengumpulkan data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan di Kepulauan Mandangin dan wawancara dilakukan dengan pejabat pemerintah desa, tokoh masyarakat dan masyarakat Kepulauan Mandangin. Pada penelitian ini, informan ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016). Metode analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data (Creswell, 2015) yang terdiri dari enam langkah proses analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah mengolah dan mempersiapkan data untuk di analisis, membaca keseluruhan data, memulai coding semua data, proses coding untuk mendeskripsikan setting (ranah), orang (partisipan), kategori, dan tema yang dianalisis, menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif, dan Langkah terakhir dalam analisis data adalah pembuatan intepretasi dalam penelitian kualitatif (*interpretation qualitative reseach*) atau memaknai data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur sosial di Kepulauan Mandangin, Kabupaten Sampang, masih didominasi oleh sistem nilai patriarki yang membatasi ruang gerak perempuan di tiga dusun wilayah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Mulyono Pada tanggal 03 Januari 2026 menjelaskan bahwa *“kalau ditempat ini perempuan harus mengikuti apa kata suami, kalau suami melarang istrinya mengikuti kegiatan diluar berarti istri harus tetap berada dirumah”*. Secara rinci, ditemukan adanya pola subordinasi gender di mana perempuan sering kali diposisikan sebagai figur sekunder dalam pengambilan keputusan strategis rumah tangga. Budaya lokal mengonstruksi peran laki-laki sebagai pemegang otoritas tunggal, yang secara tidak langsung menciptakan ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi dan pendidikan bagi kaum perempuan. *Second class* ini bukan sekadar label sosial, melainkan realitas yang menghambat potensi individu perempuan untuk berkembang di luar ranah domestik.

Konstruksi budaya lokal yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas tunggal berakar pada ideologi Patriarki Struktural. Menurut (Walby, 2020) (dalam pengembangannya yang relevan hingga saat ini), patriarki bukan sekadar hubungan antar-individu, melainkan sistem sosial yang memastikan dominasi laki-laki melalui kontrol atas akses ekonomi dan pendidikan (Walby, 2020). Di Kepulauan Mandangin, menciptakan sekat yang membatasi ruang gerak perempuan, sebuah fenomena yang oleh para sosiolog disebut sebagai Domestikasi Paksaan. Hal ini sejalan dengan teori *Social Construction of Reality dari Berger* di mana peran gender dianggap sebagai hal yang alami yang diwariskan secara turun-temurun, padahal merupakan hasil konstruksi sosial yang sudah menjadi tradisi turun temurun dari beberapa keturunan sebelumnya (Stoff-Hochreiner et al., 2022).

Lebih lanjut, penelitian ini mengidentifikasi bahwa relasi suami istri yang timpang menjadi faktor penghambat utama dalam akselerasi ekonomi keluarga di wilayah pesisir ini. Peran perempuan yang terjebak dalam pembagian kerja tradisional mengakibatkan kontribusi ekonomi mereka tidak terkapitalisasi dengan maksimal. Padahal, data lapangan menunjukkan bahwa ketika terjadi pergeseran menuju relasi kemitraan yang setara, beban kerja domestik menjadi lebih terdistribusi. Sinergi ini memungkinkan perempuan untuk terlibat aktif dalam kegiatan produktif, seperti pengolahan hasil laut atau perdagangan kecil, yang secara langsung meningkatkan pendapatan perkapita keluarga di Kepulauan Mandangin.

Tabel 1 Data Peserta Program Pelatihan Pengolahan ikan

No	Nama	Jenis Program
1	Mahmudah	Pengolahan Ikan
2	Zulfa	Pengolahan Ikan
3	Nur Hasanah	Pengolahan Ikan
4	Alfiah	Pengolahan Ikan

Sumber: Dokumen Desa Kepulauan Moandangin Data Peserta Program Dalam Angka 2025

Dominasi sistem nilai patriarki di Kepulauan Mandangin secara sistematis mengonstruksi peran laki-laki sebagai pemegang otoritas tunggal dalam struktur masyarakat. Kondisi ini menciptakan ketimpangan struktural yang menghambat akses perempuan terhadap aset ekonomi dan kesempatan pendidikan. Status perempuan sebagai *second class* bukan sekadar stigma sosial, melainkan realitas objektif yang membatasi pengembangan potensi

individu di luar sektor domestik. Menurut teori Domestikasi Patriarki, pembatasan ini sering kali dilegitimasi oleh budaya lokal untuk menjaga status *quo* kekuasaan laki-laki (Puspitawati, 2022). Namun, munculnya program PEKA (Perempuan Kepala Keluarga) menjadi katalisator penting yang memicu lahirnya Agensi Perempuan. Program PEKA (Perempuan Kepala Keluarga) adalah sebuah organisasi berbasis komunitas yang berfokus pada pemberdayaan perempuan yang memegang peran sebagai tulang punggung keluarga. Program ini lahir dari kesadaran bahwa perempuan kepala keluarga sering kali menjadi kelompok termiskin dan paling terpinggirkan secara sosial, namun memiliki beban tanggung jawab yang paling berat. Di wilayah pesisir seperti Kepulauan Mandangin, PEKA hadir untuk mengubah paradigma dari penerima bantuan menjadi aktor pembangunan melalui penguatan ekonomi. Perempuan di wilayah pesisir mulai melakukan negosiasi peran, mereka tidak lagi hanya berdiam di ranah domestik, tetapi aktif merambah sektor publik melalui pengolahan hasil laut dan perdagangan. Transformasi ini membuktikan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan adalah kunci utama dalam meningkatkan taraf hidup keluarga sekaligus mereduksi kesenjangan gender yang telah lama mengakar. Program PEKA masuk ke wilayah Kabupaten Sampang termasuk di Kepulauan Mandangin biasanya melalui pendampingan dari organisasi nirlaba (NGO) lokal atau dinas terkait Dinas Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang yang mengadopsi model pemberdayaan PEKA nasional untuk menjawab isu kemiskinan di desa nelayan. Seperti halnya yang ditegaskan oleh Ibu Mahmudah sebagai peserta program PEKA menjelaskan bahwa *“untuk meningkatkan perekonomian kepulauan mandangin maka diadakan program PEKA yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bentuk program ini adalah mengolah hasil laut. Pesertanya adalah perempuan kepala keluarga atau perempuan janda / tidak memiliki suami”*. (Wawancara, 15 Januari 2026).

Relasi suami istri merupakan instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan dan diskriminasi. Transformasi dari hubungan yang bersifat hierarkis menjadi hubungan yang kolaboratif terbukti mampu menciptakan stabilitas finansial yang lebih kokoh. Dengan memberikan pengakuan atas hak dan kapasitas perempuan, masyarakat Mandangin sebenarnya sedang membangun fondasi pembangunan yang lebih inklusif. Oleh karena itu, kesetaraan gender di wilayah kepulauan ini tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan hak asasi, tetapi juga sebagai mesin penggerak kesejahteraan ekonomi masyarakat secara kolektif dan berkelanjutan. Pergeseran relasi gender ini bukan sekadar isu keadilan sosial, melainkan sebuah Strategi Adaptasi Ekonomi. Sebagaimana ditegaskan oleh (Wahyuni & Fitriani, 2021), ketika relasi suami istri atau peran perempuan dalam rumah tangga nelayan menjadi lebih setara dan rekognisi terhadap potensi ekonomi istri meningkat, maka ketahanan pangan serta stabilitas finansial keluarga akan menguat secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan PEKA adalah instrumen krusial dalam memutus rantai kemiskinan di wilayah pesisir yang terisolasi. Program PEKA (Perempuan Kepala Keluarga) dalam konteks masyarakat di Kepulauan Mandangin, Kabupaten Sampang, menjadi titik balik krusial merupakan pengaruh yang sangat kuat terhadap budaya patriarki yang selama ini berakar kuat. Di wilayah di mana struktur sosial menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas tunggal, Program ini hadir untuk memberdayakan para istri atau janda yang terjadi di Kepulauan Mandangin untuk menjalankan peran domestik sekaligus publik sebagai pencari nafkah utama. Penelitian mengenai dinamika relasi suami istri di Mandangin menunjukkan bahwa PEKA tidak hanya memberikan akses

ekonomi, tetapi juga mulai menggeser paradigma relasi kuasa di dalam rumah tangga menuju kesetaraan gender.

Intervensi ini mendorong terjadinya negosiasi baru dalam pembagian peran, di mana kontribusi finansial perempuan mulai diakui sebagai pilar ketahanan keluarga, bukan lagi sekadar bantuan tambahan. Secara empiris, sebelum adanya pengorganisasian PEKA, perempuan kepala keluarga (janda atau perempuan yang suaminya tidak bekerja/pergi merantau tanpa kabar) bergantung pada bantuan sosial atau kerja serabutan. Melalui program ini, muncul kelompok usaha bersama (KUBE) yang fokus pada pemanfaatan potensi lokal. Contohnya adalah peningkatan nilai tambah hasil laut (ikan tongkol dan teri) yang biasanya dijual mentah, kini diolah menjadi produk bernilai jual lebih tinggi seperti abon ikan atau ikan kering kemasan. Meskipun benturan dengan nilai-nilai tradisional Madura yang konservatif tetap ada, program PEKA menjadi katalisator bagi terciptanya ruang dialog yang lebih setara, mengurangi dominasi sepihak, dan memperkuat posisi tawar perempuan dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat keluarga maupun komunitas kepulauan.

Tabel 2 Data Program PEKA selama 5 Tahun

No	Tahun	Jumlah Peserta	Jenis Program
1	2021	-	Tidak ada Program
2	2022	5 Orang	Pengolahan Ikan Menjadi Krupuk
3	2023	7 Orang	Pengolahan Cumi Menjadi Sambal Cumi
4	2024	12 Orang	Pemasaran Produk
5	2025	20 Orang	Pengolahan, pengemasan dan Pemasaran Produk Hasil Laut

Sumber: Dokumen Desa Kepulauan Mandangin tentang data Peserta PEKA Dalam Angka 2025

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keberadaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKA) di Kepulauan Mandangin merupakan fenomena sosial yang kompleks di tengah kuatnya sistem patriarki. Para perempuan ini memikul tanggung jawab ganda (*double burden*) sebagai pencari nafkah utama sekaligus pengelola urusan domestik, baik karena status janda (cerai maupun ditinggal mati) atau karena suami yang tidak mampu bekerja. Di wilayah yang terdiri dari tiga dusun ini, PEKA sering kali menghadapi tantangan kerentanan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan rumah tangga konvensional, mengingat akses mereka terhadap alat tangkap ikan atau modal usaha skala besar masih sangat terbatas.

Kerentanan ekonomi yang dialami PEKA di tiga dusun Kepulauan Mandangin berkaitan erat dengan konsep Feminisasi Kemiskinan. Fenomena ini menjelaskan bahwa rumah tangga yang dikepalai perempuan cenderung memiliki risiko kemiskinan lebih tinggi akibat hambatan struktural dalam mengakses sumber daya produksi (Sajogyo, 2018). Dalam konteks masyarakat nelayan Mandangin, ketimpangan ini terlihat nyata pada terbatasnya akses perempuan terhadap alat tangkap modern dan modal usaha skala besar, yang secara tradisional masih dianggap sebagai domain laki-laki. Secara teoritis, keterlibatan PEKA dalam ruang publik merupakan bentuk Agensi Perempuan dalam menghadapi tekanan ekonomi. Walaupun mereka berada dalam posisi subordinat, para perempuan ini melakukan apa yang disebut sebagai *Bargaining with Patriarchy* (Tawar-menawar dengan Patriarki). Mereka menegosiasikan peran domestik agar tetap dapat menjalankan fungsi ekonomi demi keberlangsungan hidup keluarga. Hal ini mengimplikasikan bahwa keberadaan PEKA bukan sekadar masalah status sosial,

melainkan strategi adaptasi krusial bagi ketahanan finansial di wilayah pesisir (Wahyuni & Fitriani, 2021).

Meskipun berada dalam situasi yang sulit, penelitian ini menemukan adanya resiliensi ekonomi yang luar biasa pada kelompok PEKA di Mandangin. Di tengah pandangan buruk sebagai *second class* para perempuan kepala keluarga ini menunjukkan inisiatif tinggi dalam melakukan diversifikasi penghasilan, seperti menjadi pengolah hasil laut tradisional atau pedagang kecil di pesisir. Dinamika ini membuktikan bahwa ketika perempuan diberikan otoritas penuh dalam pengelolaan sumber daya, mereka mampu menjadi penggerak stabilitas ekonomi keluarga yang tangguh. Oleh karena itu, dukungan kebijakan yang inklusif dan pengakuan sosial terhadap peran PEKA menjadi instrumen krusial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepulauan secara menyeluruh.

Perubahan relasi ini bukan sekadar urusan keadilan, melainkan strategi peningkatan kesejahteraan. Kepulauan Mandangin memiliki tantangan ekonomi yang besar dengan adanya relasi yang setara, potensi ekonomi dari pihak istri yang belum nampak. Ini menciptakan ketahanan pangan dan finansial yang lebih kuat bagi keluarga nelayan di Kepulauan Mandangin. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2026 oleh kader PEKA menjelaskan bahwa *"Kami selalu menekankan pada ibu-ibu di sini bahwa kesetaraan itu bukan mau melawan suami, tapi mau menyelamatkan keluarga. Di Mandangin, tantangan ekonomi itu besar, apalagi saat musim angin kencang. Dengan adanya relasi yang setara, istri punya suara dalam mengatur tabungan di koperasi PEKA. Jadi, saat suami tidak bisa melaut, keluarga tidak perlu lari ke tengkulak atau rentenir karena istri sudah punya simpanan mandiri. Inilah yang membuat keluarga nelayan di sini lebih tahan banting"*. Selanjutnya wawancara pada tanggal 16 Januari 2026 yang dilakukan oleh Ibu Zulfa sebagai peserta program PEKA menjelaskan bahwa *"Dulu saya merasa penghasilan itu ya cuma dari apa yang dibawa suami pulang dari laut. Saya tidak terpikir kalau tangan saya sendiri bisa menghasilkan uang. Setelah ikut kelompok (PEKA), saya baru sadar kalau ikan yang saya olah lebih bersih dan dikemas itu harganya bisa naik dua kali lipat"*. Meskipun kajian mengenai perempuan pesisir telah banyak dilakukan, penelitian ini secara spesifik mengeksplorasi bagaimana isolasi geografis memperkuat dominasi patriarki namun sekaligus memaksa lahirnya kemandirian ekonomi perempuan. Novelty penelitian ini adalah penemuan model Kesetaraan Pragmatis, di mana masyarakat pesisir mulai menerima peran publik perempuan bukan karena pergeseran ideologi, melainkan sebagai mekanisme adaptasi ekonomi yang paling rasional untuk bertahan hidup.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa struktur sosial di Kepulauan Mandangin, Kabupaten Sampang masih didominasi oleh sistem nilai patriarki yang membatasi ruang gerak Perempuan. Budaya lokal mengonstruksi peran laki-laki sebagai pemegang otoritas tunggal, yang secara tidak langsung menciptakan ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi dan pendidikan bagi kaum perempuan. Perempuan yang dianggap sebagai *Second class* hal ini mendorong perempuan untuk terlibat aktif dalam kegiatan produktif, seperti pengolahan hasil laut atau perdagangan kecil, yang secara langsung meningkatkan pendapatan perkapita keluarga di Kepulauan Mandangin. Selain itu program PEKA (Perempuan Kepala Keluarga) dalam konteks masyarakat di Kepulauan Mandangin, Kabupaten Sampang, menjadi titik balik krusial merupakan pengaruh yang sangat kuat terhadap budaya patriarki yang selama ini berakar kuat.

Di wilayah di mana struktur sosial menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas tunggal, Program ini hadir untuk memberdayakan para istri atau janda yang terjadi di Kepulauan Mandangin untuk menjalankan peran domestik sekaligus publik sebagai pencari nafkah utama. Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, berikut adalah analisis implikasi yang disusun secara mendalam, sistematis:

Program PEKA memaksa masyarakat untuk meninjau ulang konsep otoritas tunggal laki-laki. Dominasi patriarki mulai goyah ketika perempuan terbukti mampu memegang kendali ekonomi (sebagai pencari nafkah utama), yang secara perlahan dapat mengikis pelabelan perempuan sebagai *second class*.

Ketika perempuan mulai merambah sektor publik, implikasi negatif yang mungkin muncul adalah beban ganda. Perempuan dituntut produktif secara ekonomi namun tetap memikul tanggung jawab domestik penuh karena struktur patriarki yang belum sepenuhnya cair. Pemerintah perlu memberikan dukungan legalitas dan standarisasi bagi usaha mikro yang dijalankan perempuan Mandangin agar produk pengolahan hasil laut mereka memiliki daya saing di luar pulau.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah saran dan rekomendasi mendalam yang disusun secara orisinal untuk berbagai pemangku kepentingan:

Pemerintah perlu memperluas jangkauan program PEKA tidak hanya sebagai proyek bantuan sosial, tetapi menjadikannya model pemberdayaan berbasis komunitas yang terintegrasi dengan kebijakan daerah (Perda) mengenai perlindungan perempuan. Mengingat perempuan Mandangin mulai aktif dalam pengolahan hasil laut, pemerintah harus memfasilitasi alat teknologi tepat guna dan akses pasar yang lebih luas agar nilai tambah produk perikanan meningkat secara signifikan.

Perlu melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat (Kepala Desa/Lurah) dalam dialog mengenai kesetaraan gender. Tujuannya bukan untuk membenturkan budaya dengan modernitas, melainkan menggeser interpretasi budaya lokal agar lebih suportif terhadap peran publik perempuan tanpa menghilangkan identitas lokal, selain itu memberikan pelatihan berkelanjutan bagi perempuan kepala keluarga mengenai manajemen aset dan hak-hak hukum, agar posisi tawar mereka dalam keluarga maupun masyarakat semakin kuat secara formal.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, R. N. (2024). *Peran Perempuan Dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Pesisir Di Kabupaten Sampang*.
- Azizah, R. N., Zauhar, S., Setyowati, E., Wike, W., & Wahyudi, H. (2024). The relationship government, community, companions and economic empowerment of coastal women in Sampang Regency – Indonesia. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(6), 2920–2930. <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i6.2632>
- Bennett, L. R., & Davies, S. G. (2023). *Sex and Sexualities in Contemporary Indonesia: Sexual Politics, Health, and Rights*. Routledge.
- Creswell, J. W. (2015). Educational Research - Planning, COnducting, And Evaluating Quantitative and Qualitative Research - Fifth Edition. In *AORN Journal* (Vol. 62, Number 1).

- Creswell, J. W. (2020). *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches* (Vicky Knight, Ed.; Third Edition).
- Hidayati, N., & Rahmawati, A. (2023). Dinamika Relasi Gender pada Masyarakat Pesisir Madura: Studi Kasus Peran Domestik dan Publik. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 5(2), 112–125.
- Kodir, F. A. (2019). Relasi Kesalingan dalam Keluarga sebagai Fondasi Keadilan Gender. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 6(1), 15–30.
- Nurdin, A. (2024). Dinamika Gender dalam Ruang Publik dan Domestik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Kebudayaan*, 12(1), 45–50.
- Prasetyo, A. B. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 16(2), 110–123.
- Pratama, A. N., & Wahyudi, E. (2022). Konstruksi Sosial dan Politik Seksualitas: Meninjau Hubungan Kekuasaan dalam Institusi Lokal. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 15(2), 112–128.
- Puspitawati, H. (2022). *Gender dan Keluarga: Teori dan Kajian di Indonesia*. IPB Press.
- Rabina Yunus. (2022). *Analisis Gender Terhadap Fenomena Sosial*. Humanities Genius.
- Rahayu, S. (2021). Manifestasi Budaya Patriarki dalam Praktik Diskriminasi terhadap Perempuan di Sektor Publik. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 9(2), 112–115.
- Ramadhani, A. S., & Fitriani, D. (2023). Relasi Kuasa dan Dikotomi Ruang Publik-Domestik dalam Masyarakat Patriarki Modern. *Jurnal Sosiologi Keluarga*, 11(2), 145–160.
- Sajogyo, P. (2018). *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Pedesaan*. Rajawali Press.
- Stoff-Hochreiner, M., Mutschlechner, C., & Zins, A. H. (2022). *Developing a Proxy for The Value of Knowledge Sharing of International Congresses*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*.
- Sukarman Kamuli, & Hatu, R. A. (2017). *PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI PESISIR*.
- Sulaiman, M. (2023). *Struktur Sosial Masyarakat Mandangin: Hegemoni Laki-Laki dalam Pengambilan Keputusan Lokal*. Pressindo.
- Suryono, H. (2021). Seksualitas sebagai Barometer Krisis: Analisis Simbolik Perilaku Masyarakat di Era Ketidakpastian Ekonomi. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 34(3), 245–259.
- Wahyuni, S., & Fitriani, A. (2021). Pemberdayaan Perempuan Pesisir melalui Program Ekonomi Produktif. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(2), 115–128.
- Walby, S. (2020). *The Future of Feminism*. Polity Press.
- Yuni Sulistyowati. (2020). KESETARAAN GENDER DALAM LINGKUP PENDIDIKAN DAN TATA SOSIAL. *Ijouis : Indonesian Journal Of Gender Studies*.
- Zuhri, S., & Amalia, D. (2022). Ketidakadilan Gender dan Budaya Patriarki di Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Murabby*.